

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu negara yang terdampak Coronavirus Disease (COVID-19) adalah Indonesia. Seluruh pemerintah dunia telah memberlakukan aturan lockdown sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Peraturan tersebut berlaku juga di Indonesia. *Lockdown* di Indonesia dilanjutkan dengan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Hal ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia agar masyarakat mengurangi interaksi antara satu dengan yang lain dan mengurangi kontak sehingga bisa memutus rantai penyebaran *Corona Virus*. Setelah dua tahun penyebaran virus corona ini, Pada bulan September 2021 akhirnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia mulai menurun (WHO, 2020)

Penyebaran Corona Virus ini berdampak banyak pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya bahkan pendidikan (Nurhayati & Ratnaningsih, 2022). Terdapat dampak yang cukup besar yang dirasakan dalam aspek Pendidikan dan berbagai kalangan dapat merasakannya (Puspita et al., 2021). Akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menyatakan larangan semua kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor, guna mencegah penyebaran virus corona, khususnya di sektor sekolah tanggal 18 Maret 2020 lalu. Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19, yang menyatakan bahwa selama pandemi ini, siswa akan belajar di rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui pembelajaran elektronik, hal ini memberikan pengalaman baru yang bermakna bagi siswa.

Pendidikan kecakapan hidup dan mendalami pembelajaran tentang pandemic Covid-19 adalah hal yang difokuskan pada pembelajaran di rumah (Halijah, 2020). Namun faktanya, pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung. Siswa, guru, dan orang tua menghadapi banyak hambatan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Setyorini. Diklaim kurangnya penguasaan teknologi, tambahan biaya pembelian kuota internet, dan tambahan pekerjaan orang tua yang harus menemani anaknya

Belajar, mengurangi komunikasi dan sosialisasi siswa, mengurangi interaksi guru-orang tua, dan jam kerja guru menjadi tidak terbatas (Setyorini, 2020). Meskipun banyak kendala yang dapat menghambat pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), bukan berarti proses pembelajaran menjadi terhenti, karena sekolah harus terus berjalan mencetak siswa untuk memenuhi kebutuhan global yang relevan (Arafah & Bahri et al., 2020).

Saat ini pemerintah sedang memberlakukan kebijakan kebiasaan baru yang berpotensi menimbulkan banyak ketidakpastian di segala aspek kehidupan. Kebijakan ini sudah berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kebiasaan baru ini merupakan langkah pemerintah yang sudah memperhitungkan potensi risiko yang menyertai sebagai dampak dari kebijakan ini.

Pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilaksanakan di zona hijau dengan tetap memperhatikan kaidah kesehatan, sesuai dengan siaran pers 137/sipres/a6/vi/2020 tentang pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun ajaran baru di masa pandemi Corona Virus (Covid-19). Alhasil, kegiatan belajar tatap muka kini dimungkinkan di sejumlah kawasan zona hijau di Indonesia.

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan secara penuh di 99% satuan pendidikan dalam situasi Covid-19 level 3 dan 2, sesuai dengan SKB 4 Menteri, sedangkan satuan pendidikan pada level 4 masih melaksanakan PJJ secara penuh. Pembelajaran tatap muka terbatas hanya dilaksanakan pada level 3,2, dan 1, meskipun hal ini akan tetap bervariasi sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi (Kemendikbud, 2021).

Setelah dua tahun mengalami ketidakpastian dalam pembelajaran, akhirnya pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk memberikan kepastian lebih kepada siswa dalam proses belajar. Surat Nomor 2 Tahun 2022 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membahas tentang kebijaksanaan mengadopsi keputusan bersama 4 (empat) menteri tentang pelaksanaan pembelajaran selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua) dengan aturan dari kapasitas yang ruang kelas yang dimiliki sekolah jumlah siswa hanya diperbolehkan 50% (lima

puluh persen) dari kapasitas ruang kelas (Kemendikbud, 2021). Alhasil, selain mempercepat vaksinasi bagi warga satuan pendidikan, pemerintah terus mendorong sekolah-sekolah pada wilayah PPKM level 1-3 untuk segera menggelar satuan tugas (Satgas) COVID-19 tingkat sekolah untuk mendorong efektifitas vaksinasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas ini. Perlunya gugus tugas Covid-19 di masing-masing satuan pendidikan karena akan membantu pelaksanaan protokol kesehatan dan kebiasaan hidup sehat baru.

Untuk mempersiapkan penerapan PTM terbatas, sekolah harus memulai berbagai kegiatan guna menuntaskan berbagai persiapan yang dituangkan dalam Permendiknas 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Protokol Kesehatan menjadi salah satu hal yang harus disiapkan sekolah.

Sesuai SKB tersebut, protokol kesehatan yang harus dipatuhi, antara lain: a) memakai masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu; b) menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar orang dan/atau antar kursi/meja; c) menghindari kontak fisik; d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar; e) tidak berbagi makan dan minum, serta tidak makan dan minum berhadapan-hadapan dan berdekatan; f) menerapkan etika batuk dan bersin; g) rutin mencuci tangan (Salinan SKB 4 Menteri 21 Des 2021, 2021).

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia (RI) mencatat, pada prinsipnya sistem pengawasan yang lengkap dalam pembelajaran tatap muka tidak semata-mata menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Namun, juga menjadi tanggung jawab orang tua di rumah dan aspek lingkungan lainnya, yang semuanya diawasi oleh Posko dan berbagai kelompok tugas yang diselenggarakan di berbagai lembaga publik dan sosial. Begitu halnya dengan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cimalaka harus sudah mulai mempersiapkan untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan protokol kesehatan sesuai dengan STB 4 Menteri.

Karena kecamatan ini termasuk kedalam PPKM Level 3 sehingga dapat menerapkan kebijakan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran yaitu satuan pendidikan dengan capaian pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2 dan sudah paling

sedikit 10% (sepuluh persen) masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan ketentuan : (1) dilakukan secara bergantian setiap hari; (2) dari kapasitas ruang kelas yang ada jumlah peserta didik hanya 50% (lima puluh persen); dan (3) jam pelajaran per hari hanya diperbolehkan 4 (empat) jam paling banyak. b) satuan pendidikan dengan capaian pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2 dan minimalnya 10% (sepuluh persen) dari masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota sudah mendapatkan vaksinasi dosis 2, dilaksanakan pembelajaran. Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cimalaka berjumlah 29 sekolah. Peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan Sekolah Dasar dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di Kecamatan Cimalaka.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan keadaan Indonesia yang belum stabil oleh pandemi virus Covid-19 ini banyak aspek yang terdampak dan tidak terkecuali bidang pendidikan. Banyak peraturan dan berbagai metode yang digunakan agar pembelajaran terus berlanjut dan tidak berhenti hanya karena adanya pandemic Covid-19. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi sementara untuk melanjutkan pembelajaran dan agar siswa tidak tertinggal. Dua tahun dengan pembelajaran jarak jauh akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menimbang segala resiko yang akan terjadi. Hal ini juga sangat beresiko sekali terhadap munculnya klaster baru penularan Covid-19. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan, diputuskanlah rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu “Bagaimana persiapan sekolah mengenai protokol kesehatan yang diterapkan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan kesiapan sekolah dan penerapan protokol kesehatan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan kajian, khususnya mengenai persiapan sekolah dan tata cara kesehatan yang dilaksanakan di SD Negeri Kabupaten Cimalaka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian bagi peneliti dan masyarakat adalah mengetahui gambaran persiapan sekolah protokol kesehatan yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Cimalaka.